



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 31 Januari 2024


Wika Lita Junanto, S.Sos
Kepala Kecamatan Tingkat I
NIP. 19671007 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	18
1.4. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	21
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	30
3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan	34
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Rencana Tindak Lanjut	37

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan

Poncowarno Tahun 2021-2026 Sampai Dengan Tahun 2023

Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

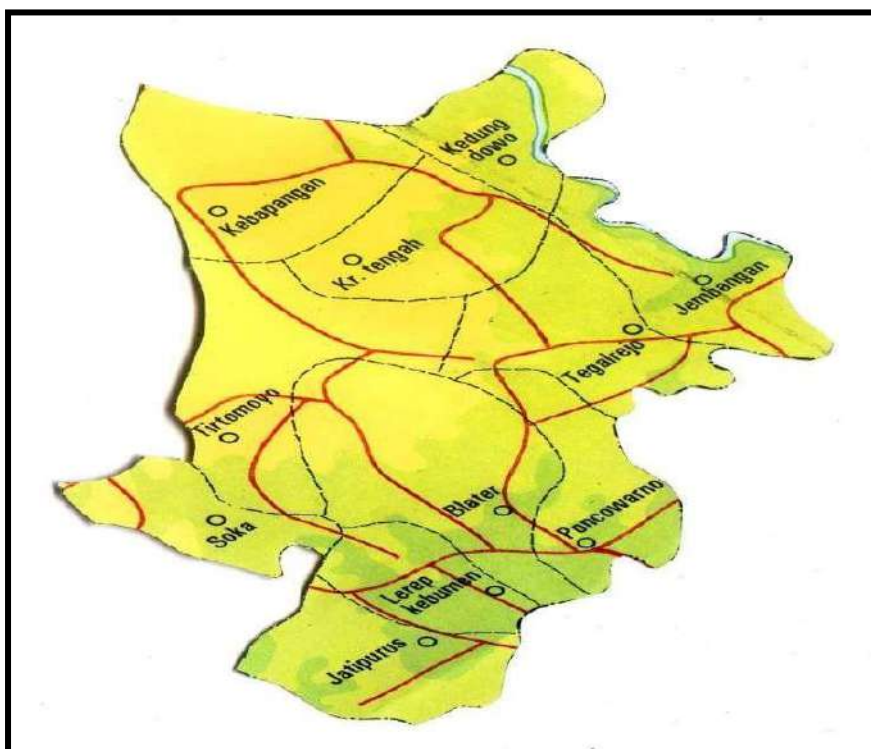
A. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu kecamatan dari 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Poncowarno merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah Kecamatan Alian, yang peresmian pemekarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2004. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44/XII/1989 tentang Pemekaran Kecamatan Perwakilan.

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201–205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT–7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno



Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Poncowarno terdiri dari 11 (sebelas) pemerintah desa, yaitu: Jatipurus, Lerepkebumen, Blater, Poncowarno, Tegalrejo, Jembangan, Karangtengah, Kedungdowo, Kebapangan, Tirtomoyo, dan Soka. Gambaran Penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2023

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	
1.	Jatipurus	636	596	1.232
2.	Lerepkebumen	954	912	1.866
3.	Blater	813	777	1.590
4.	Poncowarno	764	791	1.555
5.	Tegalrejo	445	440	885
6.	Jembangan	1.135	1.011	2.146
7.	Kedungdowo	253	257	510
8.	Karangtengah	1.250	1.400	2.650
9.	Tirtomoyo	1.343	1.232	2.575
10.	Soka	1.733	1.631	3.364
11.	Kebapangan	776	779	1.555
	TOTAL	10.102	9.826	19.928

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kec. Poncowarno, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 19.928 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 50,69% dan perempuan sebanyak 49,31%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 249 siswa dan 21 orang guru, 14 sekolah SD/Sederajat jumlah 1.688 siswa dan 10 orang guru, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 648 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu 2 unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 8 unit, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) sebanyak 11 unit dengan dukungan tenaga medis dan paramedis terdiri dari : Dokter Umum 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, perawat 10 orang, bidan 16 orang, petugas farmasi 2 orang dan petugas gizi 1 orang, paramedis dan jabatan fungsional kesehatan lainnya.

Sedangkan tenaga kader kesehatan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Poncowarno. Puskesmas Poncowarno melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keberadaan kedua Pasar Desa tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat perdagangan masyarakat Kecamatan Poncowarno akan tetapi juga masyarakat sekitar Kecamatan Poncowarno seperti Kutowinangun, Prembun, Kebumen dan Padureso. Komoditi terutama hasil pertanian, pedagang maupun pembeli berasal dari dalam maupun luar Kecamatan Poncowarno. Dari sisi Pendapatan Asli Desa kedua Pasar Desa tersebut memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa melalui retribusi dari pedagang maupun dari sewa kios yang dimiliki oleh desa.

Demikian juga keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa maupun terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang aktif di Kecamatan Poncowarno ada 3 (tiga) unit yakni, 1) BUMDes Tegalrejo kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

Potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai obyek pariwisata antara lain Obyek pariwisata Jembatan Wisata Air (JWA) di Desa Jembatan, Wisata Alam Prabu (WAP) di Desa Tirtomoyo dan Kedungdowo Adventure Park di Desa Kedungdowo semuanya merupakan

destinasi pariwisata yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat Poncowarno dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 5 (lima) orang Staf dan 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas.

B. Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Poncowarno terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Poncowarno berjumlah 15 orang dengan rincian :

Pejabat Struktural : 8 orang

Staf : 5 orang

Susunan Staf Kecamatan Poncowarno

Staf Sekretariat : 3 orang

Staf Tata Pemerintahan : - orang

Staf PM : 1 orang

Staf Trantib : - orang

Staf Yanmum & Kesos : 1 orang

2. Data Kepegawaian

- a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan
Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan S1 yaitu 6 orang atau sekitar 38,46%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA	4
3.	Diploma/D3	1
4.	Sarjana /S1	5
5.	Pasca Sarjana/S2	3
	JUMLAH	13

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2023

- b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin
Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 7 orang, dan 6 orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Subag Umpeg	-	1	1
4.	Subag PK	2	2	4
5.	Seksi Tapem	-	1	1
6.	Seksi PM	1	1	2
7.	Seksi Trantib	1	-	1
8.	Seksi Yanmum & Kesos	1	1	2
	JUMLAH	7	6	13

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2023

- c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang
Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 7 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan
Tahun 2023

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML
			II				III				IV				
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Camat										1				1
2	Sekretariat										1				1
3	Subag Umpeg							1							1
4	Subag PK								1						1
5	Kasi PM								1						1
6	Kasi Tapem									1					1
7	Kasi Trantib									1					1
8	Kasi Yanmum & Kesos										1				1
9	Staf			2	1		2								5
	JUMLAH			2	1		3		4	2	1				13

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2023

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Poncowarno dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 5).

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

1. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
2. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Poncowarno (Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala Rayon Militer) serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan seperti Korwil Bidang Pendidikan, Koordinator Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Koordinator Dinas Sosial dan Keluarga Berencana, UPT Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SMP Negeri Poncowarno, SMP Negeri Satu Atap Poncowarno, Penyuluh

Kehutanan dan Perkebunan, Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;

3. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
5. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

1. Camat dijabat oleh Wikan Tris Junanto, S.Sos, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
 - i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Camat dijabat oleh Nasrudin, S.IP., M.M, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Istikomah, S.ST., dengan dibantu oleh staf yaitu : Minarto, Mokhamad Tosin, dan Siti Laelatussolikhah, A.Md.Akun, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Siti Romadhoniati, SE, dengan dibantu oleh staf yaitu : 1 (satu) orang THL atas nama Suryanto, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dijabat oleh Yasinta Swasti Mahargyani, S.Mn. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
 - i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
 - j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
 - l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - n. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dijabat oleh Adi Buntoro, S.E, M.Si, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan

- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Wahjoe Boedi Prasetijo, SE, MM dan dibantu oleh Sri Suryati dan 1 (satu) orang THL, Susiyanto, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah

kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

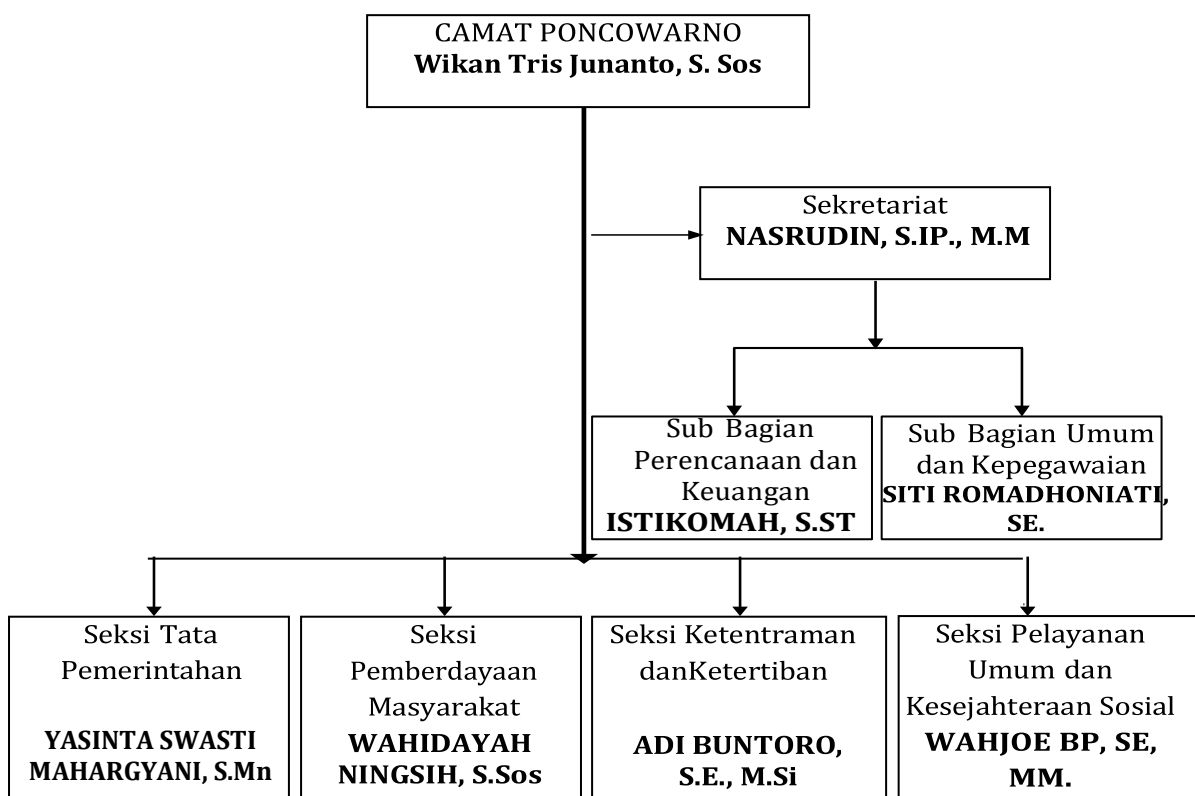
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan

kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan

- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna memperjelas gambaran mengenai susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno sebagaimana telah diuraikan di awal, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

Diagram 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno



1.3 Anggaran Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2023 berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Kebumen. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Poncowarno mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.141.837.000,00 terdiri Belanja Operasi Rp.2.126.661.000,00 (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal Rp.15.176.000,00 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.8
Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2023

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Perubahan 2023
	Total Belanja	1.832.338.000	2.141.837.000
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.613.283.000	1.915.674.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.412.740.000	1.714.931.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.553.000	33.553.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000	16.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.750.000	71.950.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.240.000	70.240.000
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.334.000	59.442.000
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.334.000	59.442.000
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.750.000	21.750.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.750.000	21.750.000
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000	144.971.000

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran Murni 2023	Anggaran Perubahan 2023
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000	144.971.000

1.4. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
2. Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
3. Cepatnya reformasi birokrasi dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah;
4. Adanya perubahan regulasi di tingkat Kabupaten.

B. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2023 sangat terpengaruh dengan adanya regulasi yang berubah-ubah;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

D. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
2. Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah Kabupaten Kebumen yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan tetap mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 bahwa dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk :

1. menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders*

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsive serta Penerapan <i>E-Gov</i> dan <i>Open-Gov</i> Terintegrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		2. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel
		3. Terwujudnya birokrasi yang kapabel
	2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya.	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		2. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
		3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
	3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Sumberdaya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis dan Ekonomi Kerakyatan	1. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer
		2. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder
		3. Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier
		4. Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah
		5. Berkurangnya penduduk miskin
		6. Berkurangnya pengangguran
	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk

		kesejahteraan masyarakat
	5. Mewujudkan Masyarakat yang Rukun, Berbudaya dan Bermartabat	1. Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan
		2. Meningkatnya pembangunan kebudayaan
		3. Meningkatnya ketertiban masyarakat
		4. Terwujudnya wilayah tangguh bencana

3. pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kebumen; dan
4. memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 2. 1.

**Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026**

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, sesuai dengan fungsinya Kecamatan Poncowarno mendukung pada misi pertama yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Pelayanan Birokrasi yang Responsif serta Penerapan *E-Gov* dan *Open-Gov* Terintegrasi”.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021-2026 adalah “mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik”.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan	Nilai	Jumlah Masyarakat Puas/ Jumlah layanan

		publik oleh kecamatan		
--	--	--------------------------	--	--

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

4. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	%	86,00

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 11 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno
Tahun 2023

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		86				86
2	Sasaran: Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		86				86

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.1.832.338.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp.1.817.162.000,00 dan Belanja Modal Rp.15.176.000,00. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2023, Kecamatan Poncowarno mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.2.141.837.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.2.126.661.000,00 dan Belanja Modal Rp.15.176.000,00.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2023

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.613.283.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	86%	52.334.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100%	21.750.000,00
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun	29,17%	144.971.000,00

		kategori maju dan mandiri		
--	--	---------------------------	--	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno
Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	86				86
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	86				86

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2023

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.915.674.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	86%	59.442.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100%	21.750.000,00

4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	29,17%	144.971.000,00
----	---	---	--------	----------------

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat,

serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan

hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,44	105,16%
	Sasaran				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,44	105,16%

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan

informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

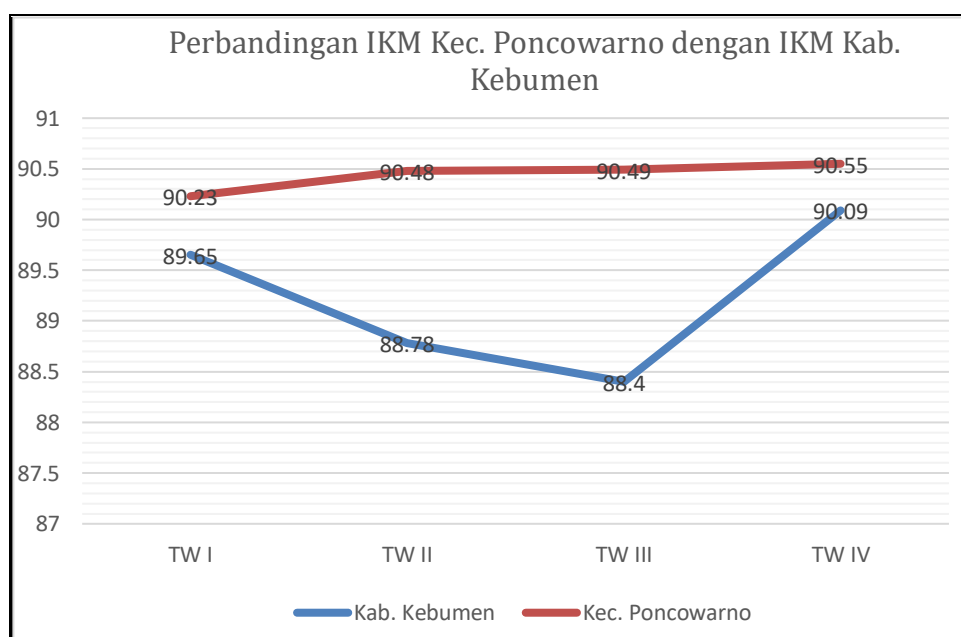
No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,88	86	90,44	105,16%	89,00	101,62%

Sumber : IKM Kecamatan Poncowarno, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (90,44) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,88) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel diambil dari berbagai usia dan pendidikan pada Kecamatan Poncowarno.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno tahun 2023 sebesar 101,62% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 101,62%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan Poncowarno dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Poncowarno jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Triwulan I, II, III dan IV, dengan demikian realisasi IKM Kecamatan Poncowarno di atas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2023

No.	Unsur	Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Kutowinangun		Nilai Kecamatan Alian	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1.	Persyaratan	94,09	Sangat Baik	94,59	Sangat Baik	89,94	Sangat Baik
2.	Prosedur	93,33	Sangat Baik	93,36	Sangat Baik	90,78	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	84,95	Baik	90,72	Sangat Baik	89,76	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	99,24	Sangat Baik	99,17	Sangat Baik	99,87	Sangat Baik
5.	Produk Layanan	90,93	Sangat Baik	92,91	Sangat Baik	90,59	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	93,15	Sangat Baik	93,19	Sangat Baik	92,25	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	88,83	Sangat Baik	93,82	Sangat Baik	93,61	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	79,87	Baik	92,85	Sangat Baik	89,43	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan	97,79	Sangat Baik	98,40	Sangat Baik	99,81	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Kutowinangun dan Kecamatan Alian rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur IKM Kecamatan Poncowarno yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya perlu adanya pelatihan *excellent service* bagi petugas layanan publik.
3. Unsur Sarana dan Prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai Kantor Kecamatan Poncowarno dan pemohon layanan publik demi menunjang pelayanan yang lebih baik (menyediakan minuman gratis).

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,76%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	105,16%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	105,16%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100%	Menunjang
Rata – rata					100,58%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat

disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100,58% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2 Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	89,23	103,76%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86	90,44	105,16%	2.141.837.000	1.996.802.712	93,23%	11,35%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 11,35% dari pagu anggaran netto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksana anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,44 atau capaian kinerja sebesar 105,16% dengan kategori kinerja **Sangat Baik**.

Keterkaitan Sasaran dan Program menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100,58% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (90,44) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,88) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel lebih banyak serta penilaian masyarakat terhadap pelayanan lebih baik.

4.2. Saran

IKM Kecamatan Poncowarno rata-rata kategori **Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

4. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
5. Unsur Perilaku Pelaksana tindak lanjut perbaikannya perlu adanya pelatihan *excellent service* bagi petugas layanan publik.
6. Unsur Sarana dan Prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana bagi pegawai Kantor Kecamatan Poncowarno dan pemohon layanan publik demi menunjang pelayanan yang lebih baik (menyediakan minuman gratis).

LKjIP Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, 31 Januari 2024



CAMAT PONCOWARNO,
Wikaningsunanto, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19671007 198803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

42

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIN, S.STP, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,


JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN PONCOWARNO**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88				88
Sasaran :								
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	indeks	88				88

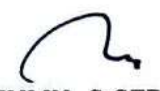
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.613.283.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 52.334.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 21.750.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 144.971.000,-	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

Bupati Kebumen,


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Camat Poncowarno,


JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN PONCOWARNO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Pengadaan Barang, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Pengadaan Barang, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar.	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.613.283.000,-	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

Camat Poncowarno,

Sekretaris Camat,

JULIN, S.STP, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001

NASRUDIN, SIP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,



*H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H

NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIKOMAH, S.ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NASRUDIN, SIP, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

NASRUDIN, SIP, MM
NIP. 19670905 198903 1 013

Pihak Pertama,

ISTIKOMAH, S.ST
NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
3.	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
4.	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%
5.	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%
6.	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.135.000,00	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000,00	APBD

Kebumen, 2 Januari 2023

Sekretaris Camat,

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan,



NASRUDIN, SIP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013



ISTIKOMAH, S.ST

NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,

CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURJANAH, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Poncowarno

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NASRUDIN, SIP, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Poncowarno

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

NASRUDIN, SIP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013

Pihak Pertama,

NURJANAH, SE

NIP. 19760505 199903 2 007



Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,
JULIN, S. STP, M.Si.
NIP. 19790121 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%
3.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%
4.	Meningkatnya layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%
5.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
6.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
8.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang sesuai ketentuan	100%
9.	Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 unit
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
12.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa surat-menyurat yang sesuai standar	100%
13.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%
15.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	100%
16.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%
17.	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 bulan
18.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.000,00	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.088.000,00	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.250.000,00	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.000,00	APBD
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	APBD
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.750.000,00	APBD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%
15.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	100%
16.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%
17.	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 bulan
18.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.000,00	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.088.000,00	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.250.000,00	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.000,00	APBD
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	APBD
9.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.750.000,00	APBD

12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.577.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	APBD
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.663.000,00	APBD

Kebumen, 2 Januari 2023

Sekretaris Camat,

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,




NASRUDIN, SIP, MM

NURJANAH, SE

NIP. 19670905 198903 1 013

NIP. 19760505 199903 2 007

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,
KECAMATAN
PONCOWARNO
JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791021 199912 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KECAMATAN PONCOWARNO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase layanan fasilitasi desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya layanan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.000.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	68.971.000,00	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

Camat Poncowarno,

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

JULIN, S.STP, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001

DARMIYATI, SAP

NIP. 19650509 200701 2 013

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD USANG SUGIONO, S.H

NIP. 19641117 199201 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA
KECAMATAN PONCOWARNO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase layanan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	100%
4.	Meningkatnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.000.000,00	APBD
2.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	APBD
3.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000,00	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

Camat Poncowarno,

Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan,

JULIN, S.STP, M.Si.

ADI BUNTORO, SE, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001

NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,

KASEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H

NIP. 19641117 199201 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA
KECAMATAN PONCOWARNO**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan.	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.750.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	APBD

Kebumen, 20 Januari 2023

Camat Poncowarno,

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,


JULIN, S.STP, M.Si.


ADI BUNTORO, SE, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001

NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	52.334.000,00	APBD
2.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	APBD


Kebumen, 20 Januari 2023

Camat Poncowarno,



JULIN, S.STP, M.Si
 NIP. 19791221 199912 1 001

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial,



WAHJOE BOEDI PRASETIJO, SE, MM
 NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
 NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WIKAN TRIS JUNANTO,
Jabatan : Camat Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

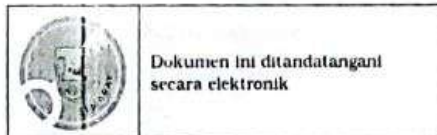
Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

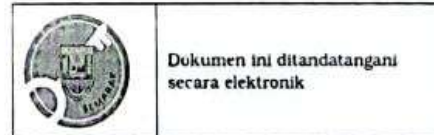
Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Pihak Pertama,



WIKAN TRIS JUNANTO. S.Sos
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN**

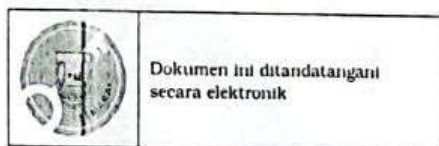
No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	86				86
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	86				86

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.613.283.000,00	1.915.674.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	52.334.000,00	59.442.000,00	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.750.000,00	21.750.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000,00	144.971.000,00	APBD

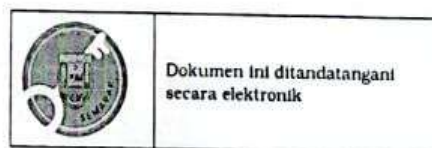
Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Camat Poncowarno
Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



WIKAN TRIS JUNANTO, S.Sos
NIP. 19671007 198803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Poncowarno
Tahun 2021 – 2026 Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	11	11	100%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	100%
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	6	6	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100%
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	13	13	100%
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	4	4	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	100%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100%
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	100%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100%
9.	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	Bulan	12	12	100%
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	4	4	100%
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	Unit	3	3	100%
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pengadaan sarpras gedung kantor	Unit	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	100%
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100%
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100%
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	22	22	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	11	11	100%
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	10	10	100%
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	1	50%
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	86	90,44%	105,16%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jenis	5	5	100%
19.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan nonperijinan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	100%
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
20.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan & Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	Kegiatan	2	2	100%
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	29,17	29,17	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan	7	7	100%
21.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	Desa	11	11	100%
22.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Dokumen	1	1	100%
23.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	2	2	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
24	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1	1	100%
25	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	1	1	100%
26	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, dan Sosmasy)	Dokumen	4	4	100%
27	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah desa yang difasilitasi bantuan sembako	Desa	11	11	100%


 CAMAT PONCOWARNO,
 Wikaningsih Junanto, S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19671007 198803 1 006

REALISASI BELANJA PER KEGIATAN

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.915.674.000,00	1.775.210.912,00	92,67
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	8.840.750,00	98,23
<i>Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4.000.000,00	3.952.000,00	98,80
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.008.000,00	1.008.000,00	100,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	598.000,00	590.000,00	98,66
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	561.000,00	559.500,00	99,73
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	550.000,00	547.500,00	99,55
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	563.000,00	559.000,00	99,29
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	688.000,00	95,56
<i>Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	5.000.000,00	4.888.750,00	97,78
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.504.000,00	1.504.000,00	100,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	460.000,00	457.300,00	99,41
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	343.000,00	337.500,00	98,40
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	683.000,00	682.650,00	99,95
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	750.000,00	749.000,00	99,87
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.158.300,00	91,93
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.931.000,00	1.604.421.117,00	93,56
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1.698.326.000,00	1.587.897.045,00	93,50
1. Belanja Gaji Pokok PNS	789.000.000,00	714.530.520,00	90,56
2. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	75.000.000,00	72.526.842,00	96,70
3. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	73.555.000,00	70.460.000,00	95,79
4. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.000.000,00	14.960.000,00	93,50

5. Belanja Tunjangan Beras PNS	41.107.000,00	39.179.220,00	95,31
6. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	6.365.000,00	4.071.653,00	63,97
7. Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000,00	8.806,00	80,05
8. Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	54.407.000,00	51.210.589,00	94,13
9. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.800.000,00	1.454.325,00	80,80
10. Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.000.000,00	4.363.038,00	87,26
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	636.081.000,00	615.132.052,00	96,71
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000,00	16.524.072,00	99,51
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.280.000,00	9.280.000,00	100,00
2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.824.000,00	3.824.000,00	100,00
4. Belanja Lembur	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00
5. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	159.000,00	115.576,00	72,69
6. Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	182.000,00	144.496,00	79,39
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.553.000,00	31.837.450,00	94,89
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000,00	1.391.500,00	99,39
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.400.000,00	1.391.500,00	99,39
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.000,00	11.390.000,00	90,29
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.615.000,00	11.390.000,00	99,99
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.088.000,00	6.087.700,00	99,99
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	6.088.000,00	6.087.700,00	99,99

<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	2.250.000,00	1.854.000,00	82,40
1. Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.250.000,00	1.854.000,00	82,40
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material</i>	8.000.000,00	7.914.250,00	98,93
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.104.000,00	2.098.000,00	99,71
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	3.016.000,00	2.960.250,00	98,15
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	2.880.000,00	2.856.000,00	99,17
<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000,00	15.184.000,00	94,90
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya</i>	12.000.000,00	11.224.000,00	93,53
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	824.000,00	824.000,00	100,00
2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.920.000,00	7.900.000,00	99,75
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	3.256.000,00	2.500.000,00	76,78
<i>Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	4.000.000,00	3.960.000,00	99,00
1. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	3.960.000,00	99,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.950.000,00	52.932.665,00	73,57
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1.000.000,00	500.000,00	50,00
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.000.000,00	500.000,00	50,00
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	50.750.000,00	32.280.165,00	63,61
1. Belanja Tagihan Telepon	342.000,00	325.250,00	95,10
2. Belanja Tagihan Listrik	42.788.000,00	25.797.715,00	60,29

3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	7.620.000,00	6.157.200,00	80,80
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.200.000,00	20.152.500,00	99,76
1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.700.000,00	2.661.500,00	98,57
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	3.368.000,00	3.359.000,00	99,73
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.132.000,00	14.132.000,00	100,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.240.000,00	67.312.830,00	95,83
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	20.577.000,00	20.102.830,00	97,70
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.032.000,00	13.032.000,00	100,00
2. Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Lainnya	3.545.000,00	3.531.000,00	99,61
3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	2.788.700,00	92,96
4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	751.130,00	75,11
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	1.960.000,00	98,00
1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.960.000,00	98,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.663.000,00	45.250.000,00	94,94
1. Belanja Bahan–Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.463.000,00	38.050.000,00	94,04
2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	59.442.000,00	52.634.900,00	88,55
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	59.442.000,00	52.634.900,00	88,55

<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	59.442.000,00	52.634.900,00	88,55
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.020.000,00	2.020.000,00	100,00
2. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.439.000,00	3.434.500,00	99,87
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
4. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	604.000,00	592.500,00	98,10
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	979.000,00	960.500,00	98,11
6. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.049.000,00	1.008.000,00	96,09
7. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	530.000,00	529.400,00	99,89
8. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	578.000,00	555.000,00	96,02
9. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.130.000,00	2.130.000,00	100,00
10. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	425.000,00	425.000,00	100,00
11. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	640.000,00	640.000,00	100,00
12. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.648.000,00	33.940.000,00	83,50
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.750.000,00	21.375.650,00	98,28
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.750.000,00	21.375.650,00	98,28
<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	21.750.000,00	21.736.150,00	99,94
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00
2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.088.000,00	1.088.000,00	100,00

3. Belanja Bahan – Bahan Lainnya	1.990.000,00	1.977.500,00	99,37
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	661.000,00	660.650,00	99,95
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	31.000,00	30.000,00	96,77
6. Belanja Natura dan Pakan – Natura	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.070.000,00	12.070.000,00	100,00
8. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
9. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000,00	141.902.850,00	97,88
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144.971.000,00	141.902.850,00	97,88
<i>Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	17.000.000,00	16.783.200,00	98,72
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	495.000,00	483.300,00	97,64
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	397.000,00	391.400,00	98,59
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	587.000,00	586.500,00	99,91
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.646.000,00	9.447.000,00	97,94
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
<i>Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	10.000.000,00	9.716.850,00	97,17
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	508.000,00	499.450,00	98,32
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	463.000,00	343.600,00	74,21
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	684.000,00	684.000,00	100,00
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	680.000,00	527.000,00	77,50

5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.015.000,00	6.012.800,00	99,96
6. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Sub Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	2.900.600,00	96,69
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	109.000,00	102.800,00	94,31
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	125.000,00	124.800,00	99,84
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	222.000,00	185.000,00	83,33
4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.544.000,00	2.488.000,00	97,80
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.000.000,00	11.653.700,00	97,11
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.872.000,00	1.872.000,00	100,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	229.000,00	188.700,00	82,40
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	130.000,00	118.000,00	90,77
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	214.000,00	150.000,00	70,09
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.830.000,00	5.600.000,00	96,05
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.475.000,00	2.475.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.000.000,00	23.439.500,00	97,66
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.119.000,00	1.114.400,00	99,59
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	323.000,00	285.000,00	88,24
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	761.000,00	760.500,00	99,93
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	375.000,00	370.000,00	98,67
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.462.000,00	12.949.600,00	96,19
6. Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER

KODE pro / keg / sub	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN						REALISASI FISIK			DEVIASI	
				KEUANGAN		FISIK	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN INI	(%)	(%)	(%)	KEU SPJ	FISIK	(%)	(%)
				(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEREMINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.915.674.000		1.915.674.000	100	100	1.658.442.721	122.086.091	1.780.528.812	92,95	100	7,05	0				
7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	9.000.000	100	100	7.364.750	1.476.000	8.840.750	98,23	100	1,77	0				
7.01.01.2.01.01		4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	100	100	3.259.000	693.000	3.952.000	98,8	100	1,2	0				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	5.000.000	100	100	4.105.750	783.000	4.888.750	97,78	100	2,22	0				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.714.931.000		1.714.931.000	100	100	1.492.878.881	111.542.236	1.604.421.117	93,56	100	6,44	0				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.698.326.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.698.326.000	100	100	1.477.317.321	110.579.724	1.587.897.045	93,5	100	6,5	0				
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.605.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.605.000	100	100	15.561.560	962.512	16.524.072	99,51	100	0,49	0				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.553.000		33.553.000	100	100	29.609.650	2.227.800	31.837.450	94,89	100	5,11	0				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.400.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.400.000	100	100	1.041.500	350.000	1.391.500	99,39	100	0,61	0				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.615.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.615.000	100	100	11.390.000		11.390.000	90,29	100	9,71	0				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.088.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	6.088.000	100	100	4.960.300	1.127.400	6.087.700	100	100	0	0				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.250.000	100	100	1.854.000		1.854.000	82,4	100	17,6	0				
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	8.000.000	100	100	7.163.850	750.400	7.914.250	98,93	100	1,07	0				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.200.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.200.000	100	100	3.200.000		3.200.000	100	100	0	0				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000		16.000.000	100	100	15.184.000		15.184.000	94,9	100	5,1	0				
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.000.000	100	100	11.224.000		11.224.000	93,53	100	6,47	0				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.000.000	100	100	3.960.000		3.960.000	99	100	1	0				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.950.000		71.950.000	100	100	47.452.610	5.480.055	52.932.665	73,57	100	26,43	0				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.000.000	100	100	500.000		500.000	50	100	50	0				

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	50.750.000	100	50.750.000	100	30.725.610	1.544.555	32.290.165	53,61	100	36,39
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.200.000	100	20.200.000	100	16.217.000	3.955.500	20.182.500	99,76	100	0,24
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah		70.240.000	100	70.240.000	100	65.952.830	1.360.000	67.312.830	95,83	100	4,17
7.01.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	20.577.000	100	20.577.000	100	18.142.830	1.360.000	20.102.830	97,7	100	2,3
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.000.000	100	2.000.000	100	1.960.000		1.960.000	98	100	2
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	47.663.000	100	47.663.000	100	45.250.000		45.250.000	94,54	100	5,06
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.442.000	100	59.442.000	100	46.649.000	5.985.900	52.634.900	88,55	100	11,45
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		59.442.000	100	59.442.000	100	46.649.000	5.985.900	52.634.900	88,55	100	11,45
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nopmenan	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	59.442.000	100	59.442.000	100	46.649.000	5.985.900	52.634.900	88,55	100	11,45
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		21.750.000	100	21.750.000	100	21.375.650	360.500	21.736.150	99,94	100	0,06
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		21.750.000	100	21.750.000	100	21.375.650	360.500	21.736.150	99,94	100	0,06
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementaskan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	21.750.000	100	21.750.000	100	21.375.650	360.500	21.736.150	99,94	100	0,06
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		144.971.000	100	144.971.000	100	127.743.350	14.159.500	141.902.850	97,88	100	2,12
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		144.971.000	100	144.971.000	100	127.743.350	14.159.500	141.902.850	97,88	100	2,12
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	17.000.000	100	17.000.000	100	15.107.200	1.676.000	16.783.200	98,72	100	1,28
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	3.000.000	100	3.000.000	100	803.600	2.097.000	2.900.500	96,69	100	3,31
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100	10.000.000	100	6.272.850	3.444.000	9.716.850	97,17	100	2,83
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterluan Umum	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.000.000	100	12.000.000	100	10.514.700	1.159.000	11.653.700	97,11	100	2,89
7.01.06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	24.000.000	100	24.000.000	100	22.174.500	1.265.000	23.439.500	97,66	100	2,34

7 01 06 2 01 16	Facilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	68.971.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	68.971.000	100	64.072.700	3.853.500	67.926.200	98,49	100	1,51	0
7 01 06 2 01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	10.000.000	100	8.797.800	685.000	9.482.800	94,83	100	5,17	0
JUMLAH		2.141.837.000		2.141.837.000	100	1.854.210.721	142.591.991	1.996.802.712	93,23	100	6,77	0

